

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya *good governance* di Indonesia semakin meningkat. Tuntutan ini memang wajar, karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa terjadinya krisis ekonomi di Indonesia ternyata disebabkan oleh buruknya pengelolaan (*bad governance*) dan buruknya birokrasi (Efendy, 2010).

Akuntabilitas sektor publik berhubungan dengan praktik transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak publik. Sedangkan *good governance* menurut World Bank didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politis maupun administratif, menciptakan disiplin anggaran, serta menciptakan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas usaha menurut Mardiasmo (2005).

Menurut Mardiasmo (2005), terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan (Efendy, 2010). Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan.

Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah inspektorat daerah.

Menurut Mardiasmo (2005), inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal. Menurut Boyton dan Rohman (2007), fungsi auditor internal adalah melaksanakan fungsi pemeriksaan internal yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Selain itu, auditor internal diharapkan pula dapat lebih memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.

Pengukuran kualitas audit atas laporan keuangan, khususnya yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan *Intern* Pemerintah (APIP), wajib menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) pada bagian pendahuluan secara *eksplisit* dan tegas dinyatakan bahwa “pengawasan *intern* pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan *intern* dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah

telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan dan ketentuan. Selain itu, pengawasan *intern* atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan *cleangovernment* dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Inspektorat sebagai *internal* audit pemerintah dan merupakan sumber informasi yang penting bagi auditor *eksternal* (BPK) dan menjadi ujung tombak untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, karena hasil audit yang berkualitas merupakan sumber informasi penting dalam memberikan keyakinan kepada pihak pemerintah, DPRD dan BPK. Pengelolaan keuangan pemerintah yang baik harus didukung audit sektor publik yang berkualitas, jika kualitas audit sektor publik rendah, kemungkinan memberikan kelonggaran terhadap lembaga pemerintah melakukan penyimpangan penggunaan anggaran. Selain itu juga mengakibatkan risiko tuntutan hukum (*legitimasi*) terhadap aparatur pemerintah yang melaksanakannya (PERMENPAN No 3, 2010).

Kualitas pemeriksaan yang dilaksanakan oleh aparat Inspektorat diseluruh Indonesia masih menjadi sorotan. Sorotan yang sering kita dengar adalah sikap kompetensi, independensi dan pengalaman auditor yang dimiliki oleh aparat pemeriksa inspektorat masih lemah. Kasus umum lainnya adalah masih banyaknya temuan audit yang tidak terdeteksi oleh aparat inspektorat sebagai

pemeriksa/auditor internal, akan tetapi ditemukan oleh auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kasus ini hampir terjadi di seluruh Indonesia dimana kualitas audit aparat BPK katanya jauh lebih baik dari aparat inspektorat karena dikaitkan dengan kompetensi dan independensi yang dimiliki oleh aparat inspektorat yang masih dianggap lemah oleh sebagian kalangan, padahal sesungguhnya tidak demikian (Efendy 2010).

Badan pemeriksaan Keuangan (BPK RI) Perwakilan Provinsi Papua menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPKD) Provinsi Papua, pada Tahun Anggaran 2014 Provinsi Papua mendapatkan Opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan, sedangkan pada Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 Provinsi Papua berhasil mendapatkan Opini WTP, sementara itu untuk Kota Jayapura pada Tahun Anggaran 2014 mendapatkan Opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan kemudian, pada tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016, Pemerintah Kota Jayapura berhasil mendapatkan Opini WTP (Kabarpapua.com, 2016).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengumumkan bahwa telah menemukan adanya penyalahgunaan dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat senilai Rp 4,281 triliun dari total dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat sebesar Rp 28,842 triliun dari tahun 2002 – 2010 (Fred Wakum, n.d.). Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Papua di atas dapat diketahui bahwa kualitas audit Aparat Inspektorat di Pemerintah Provinsi Papua, dalam pengawasan keuangan daerah masih kurang, meskipun ada Kabupaten dan

Provinsi yang mendapatkan opini WTP hal ini tidak menjadi jaminan bahwa tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi karena opini yang diberikan hanya berdasarkan kepada Pemeriksaan kelengkapan Administrasi tanpa pemeriksaan bukti fisik yang ada di lapangan.

Kasus-kasus Korupsi yang terjadi di Papua juga cukup banyak diantaranya kasus Proyek peningkatan ruas jalan Kemiri-Depapre di Provinsi Papua tersebut senilai Rp 89,5 milyar. Adapun anggaran proyek tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2015. Dalam penyelidikan KPK menemukan indikasi kerugian Negara sekitar 42 milyar atau hampir setengah dari nilai proyek yang sedang dikerjakan oleh PT. Bintuni Energy Persada (News Detik.com, 2017). Kasus korupsi yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota Jayapura, atas pengadaan batik di lingkungan pemerintah Kota Jayapura senilai 1,5 milyar lebih pada tahun 2012 (Tabloid jubi.com, 2017)

Kompetensi dan independensi merupakan standar yang harus dipenuhi oleh seorang auditor untuk dapat melakukan audit dengan baik dan dapat dipercaya namun, belum tentu auditor yang memiliki kedua hal tersebut akan memiliki komitmen untuk melakukan audit dengan baik menjelaskan bahwa hanya dengan adanya pengalaman seseorang akan mempunyai semangat juang yang tinggi untuk meraih tujuan dan memenuhi standar yang ada. Oleh karena itu, pengalaman akan mendorong seseorang termasuk auditor untuk berprestasi dan memiliki komitmen terhadap kelompok serta memiliki inisiatif dan optimisme yang tinggi.

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kualitas audit telah dilakukan oleh Ayuningtya(2012) meneliti mengenai pengaruh pengalaman kerja, independensi, obyektifitas integritas dan kompetensi terhadap kualitas hasil audit (studi kasus pada auditor inspektorat kota jawa tengah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa obyektifitas, integritas dan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan, sedangkan variabel pengalaman kerja dan independensi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hasil audit.

Efendy (2010) meneliti tentang pengaruh kompetensi, independensidan motivasi terhadap kulaitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah (Studi empiris pada pemerintah kota Gorontalo). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan variabel independensi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa secara bersama-sama kompetensi, independensi, dan motivasi memberikan sumbangan terhadap variabel dependen (kualitas audit) sebesar 72,2%, sedangkan sisanya 27,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

Dalam penelitian Nurmalita (2011) tentang pengalaman kerja, independensi, kompetensi dan etika terhadap kualitas audit hasil dari pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman kerja, independensi, objektivitas, integritas, kompetensi dan etika berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kualitas audit. Secara simultan seluruh variabel independen tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Efendy (2010) yang meneliti mengenai pengaruh kompetensi, independensi dan motivasi terhadap kualitas audit. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada tempat penelitian, populasi, dan variable penelitiannya, yaitu penelitian terdahulu dilakukan di kota Gorontalo, populasinya yaitu seluruh aparat inspektorat kota Gorontalo dan variabelnya yaitu motivasi sedangkan penelitian ini meneliti di Inspektorat Provinsi Papua dan Inspektorat Kota Jayapura, dengan populasinya yaitu seluruh aparat inspektorat provinsi Papua dan aparat inspektorat kota Jayapura dan mengganti variable motivasi menjadi variable pengalaman.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini penulis tertarik mengambil judul **“Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Pengalaman Auditor Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah.”**

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah pengalaman berpengaruh terhadap kualitas audit?

4. Apakah kompetensi, independensi dan pengalaman berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka yang dirumuskan pada penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit.
2. Untuk menganalisis pengaruh independensi terhadap kualitas audit.
3. Untuk menganalisis pengaruh pengalaman terhadap kualitas audit.
4. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi, independensi dan pengalaman terhadap kualitas audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemegang kebijakan, dalam hal ini pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas audit Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah, sehingga akan dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kualitas audit Inspektorat.
2. Bagi Inspektorat, sebagai masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya peranan Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan *good governance*. Sehingga Inspektorat diharapkan dapat membuat program yang berkontribusi pada peningkatan kualitas dan kapabilitasnya.

3. Bagi Akademisi, memberikan kontribusi pengembangan literatur akuntansi sektor publik di Indonesia. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian akuntansi sektor publik. Hasil penelitian ini juga diharapkan akan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian berikutnya

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan , penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tinjauan pustaka yang dilanjutkan dengan penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini tentang lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional dan variabel penelitian, pengukuran dan uji analisis data